



**CATATAN HASIL PENELAAHAN  
ATAS RKA-K/L PAGU ANGGARAN/PAGU ALOKASI ANGGARAN  
SATUAN KERJA BKK KELAS I BANDUNG  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG  
2025**

<b>SATKER BKK KELAS I BANDUNG KEMENTERIAN KESEHATAN RI</b>	Disusun oleh/Tanggal	Sira Elko, SKM. / tgl 21 Juli 2025 Dewi Patmawati, S.K.M. / tgl 21 Juli 2025
	Diteliti dan disetujui oleh/Tanggal	Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM. / Tgl 21 Juli 2025

#### Uraian Catatan Hasil Penelaahan

Pelaksanaan penelaahan RKA-K/L berdasarkan Surat Undangan Kepala Balai Nomor: PS.03.05/C.X.5/1675/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal kegiatan Reviu SKI terhadap RKA-K/L TA 2026 untuk pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit TA. 2026 tanggal 21 s.d 25 Juli 2025.

Penelaahan ini tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja kepada Tim SKI. Tanggung jawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bidang Perencanaan dan Evaluasi/Tim Penyusun RKA-K/L.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Penelaahan sebagai berikut:

#### A. DATA UMUM

Pagu/Alokasi Anggaran sesuai dengan usulan RKA-K/L adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1.	Rupiah Murni	18.867.491.000
2.	PNBP	7.142.399.000
JUMLAH		26.009.890.000

#### B. HASIL PENELAAHAN

Rekapitulasi hasil penelaahan adalah sebagai berikut:

NO	KODE	KETERANGAN	JUMLAH	SUMBER DANA
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			<b>7.142.399.000</b>	PNBP
1	4249.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	28.750.000	PNBP
2	4249.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	396.677.000	PNBP
3	4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	637.908.000	PNBP
4	4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	2.248.060.000	PNBP
5	4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada	32.000.000	PNBP



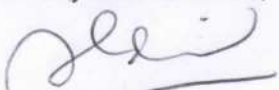


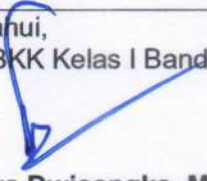
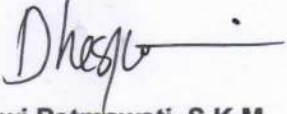
		situasi khusus (HS)		
6	4249.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	43.344.000	PNBP
7	4249.QAH.008	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	101.700.000	PNBP
8	4249.QAH.009	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	34.488.000	PNBP
9	4249.QAH.011	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	34.560.000	PNBP
10	4249.QAH.012	Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria	20.640.000	PNBP
11	4249.QAH.013	Layanan survei faktor risiko penyakit Diare	25.920.000	PNBP
12	4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	39.420.000	PNBP
13	4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	109.100.000	PNBP
14	4249.QAH.U25	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	173.600.000	PNBP
15	4249.QAH.U26	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori II	481.750.000	PNBP
16	4249.QAH.U27	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	688.750.000	PNBP
17	4249.QAH.U28	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I	79.200.000	PNBP
18	4249.QAH.U29	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori II	344.000.000	PNBP
19	4249.QAH.U30	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	637.000.000	PNBP
20	4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	985.532.000	PNBP
<b>4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>			<b>18.867.491.000</b>	<b>RM</b>
1	4815.EBA.994.01	Gaji dan Tunjangan	12.648.668.000	RM
2	4815.EBA.994.02	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.218.823.000	RM

Adapun yang menjadi catatan pada pelaksanaan penelaahan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kesesuaian anggaran pengadaan dengan ketentuan dan data dukung Terdapat : a. 4249.QAH.017.E Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Ke Pusat maksimal 3 orang, usulan 4 orang. b. 4249.QAH.017.F. Konsultasi Program Surveilans Epidemiologi ke Pusat maksimal 3 orang, usulan 4 orang. c. 4249.QAH.017.O. Bimtek/Koordinasi Tim Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus wilker keinduk maksimal 2 orang, usulan 3 orang
Kesimpulan: Usulan harap memperhatikan efektivitas dan sesuai dengan jukren
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran a. Memaksimalkan penganggaran berdasarkan SBK b. Penganggaran agar sesuai dengan jukren
Kesimpulan : Efektivitas penganggaran sesuai jukren
3. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk penelaahan RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L )
Kesimpulan : -
4. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kendaraan/sarana kantor -
Anggaran pemeliharaan telah sesuai/ <del>tidak sesuai</del> *) ketentuan. Kesimpulan : -
5. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama -
*Anggaran pemeliharaan telah sesuai/ <del>tidak sesuai</del> *) ketentuan. Kesimpulan : -
<b>Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui</b> -
<b>Catatan Penting Lainnya</b> - Terdapat penurunan jumlah anggaran pagu satuan kerja yang cukup signifikan dari pada saat desk e-renggar Rp. 38.680.859.736,- menjadi Rp. 26.009.890.000,- - Pengajuan anggaran untuk disesuaikan dengan jukren 2026.
<b>Rekomendasi</b> 1. Surveilans Epidemiologi: Tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih tajam. Contoh: "Menurunkan waktu deteksi kasus impor penyakit X dari 48 jam menjadi 24 jam" atau "Mencapai 95% kelengkapan laporan surveilans mingguan dari semua wilker secara real-time" Pengendalian Vektor: Alokasikan sebagian kecil anggaran "Pengendalian Vektor" (Kode 4249.QAH.016) untuk kegiatan evaluasi dampak. Misalnya, melakukan survei kepadatan jentik/nyamuk sebelum dan sesudah intervensi untuk mengukur efektivitas program, bukan hanya melaporkan bahwa fogging telah dilaksanakan. 2. Simulasi dan Kesiapsiagaan: Memanfaatkan anggaran "Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah" (Kode 4249.QAH.017-A) untuk melaksanakan simulasi atau tabletop exercise penanganan wabah minimal 2 kali setahun. Ini akan meningkatkan kesiapan tim secara nyata dengan biaya yang relatif kecil (hanya biaya rapat dan ATK). 3. Jasa Outsourcing (Rp 3,64 Miliar): Ini adalah pos terbesar. Lakukan evaluasi kinerja vendor setiap triwulan. Buat daftar periksa (checklist) kinerja yang jelas untuk tenaga kebersihan, keamanan, dan



pengemudi. Jika kinerja tidak sesuai kontrak, pertimbangkan untuk memberikan teguran atau bahkan mencari vendor alternatif pada siklus pengadaan berikutnya untuk mendapatkan value for money yang lebih baik.

4. Pemeliharaan Peralatan (Rp 1,00 Miliar): Implementasikan jadwal pemeliharaan preventif yang ketat untuk aset vital seperti genset, lift, dan kendaraan. Anggaran ini seringkali bersifat reaktif (memperbaiki saat sudah rusak). Dengan pemeliharaan preventif, kerusakan besar yang memakan biaya tinggi dapat dihindari.
5. Ketergantungan pada PNBP: Sebagian besar kegiatan teknis didanai PNBP. Perlu ada analisis risiko dan rencana kontingensi. Apa yang terjadi jika target PNBP tidak tercapai? Identifikasi kegiatan prioritas tertinggi yang tidak boleh berhenti dan siapkan skenario realokasi anggaran dari pos-pos yang kurang krusial jika terjadi kekurangan dana

<p>Tim Penyusun RKA-K/L,</p>  <p><b>I Sildani Kristi D, S.IP</b> NIP. 198308122015031002</p>	<p>Bandung, 21 Juli 2025 Ketua Tim SKI,</p>  <p><b>Yani Dwiyuli Setiati, SKM, MKM</b> NIP. 197107301993032001</p>
<p>Kasubbag Adm. Umum,</p>  <p><b>Wartoni, SKM, MPH</b> NIP. 197606191999031001</p>	<p>Penilai I</p>  <p><b>Sira Elko, SKM</b> NIP. 198304062008121003</p>
<p>*Mengetahui, Kepala BKK Kelas I Bandung</p>  <p><b>dr. Sedya Dwisangka, M. Epid.</b> NIP. 196901042002121003</p>	<p>Penilai II</p>  <p><b>Dewi Patmawati, S.K.M.</b> NIP. 199110112015032002</p>

**LAPORAN HASIL PENELAAHAN PAGU ANGGARAN/  
PAGU ALOKASI ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA BKK KELAS I BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2026  
21 Juli 2025**

**A. Ringkasan Eksekutif**

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP. Berdasarkan penetapan ini, Kementerian/Lembaga mengevaluasi baseline (Angka Dasar) dan mengajukan usulan Inisiatif Baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran/Pagu Alokasi Anggaran K/L yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renja K/L.

Sesuai instruksi pimpinan Satker BKK Kelas I Bandung untuk melakukan Penelaahan Usulan RKA K/L Pagu Anggaran/Pagu Alokasi Anggaran Satker BKK Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2026. Adapun Penelaahan dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L Kementerian/Lembaga setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/L.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
4. Surat Undangan Nomor PR.04.01/C.I/4350/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Undangan UPT Kegiatan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit TA. 2026.
5. Surat Undangan Nomor PS.03.05/C.X.5/1675/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Undangan Reviu SKI terhadap RKAKL 2026 Balai Karkes Kelas I Bandung tanggal 21 Juli 2025.

**C. Tujuan Penelaahan Usulan RKA-K/L**

Tujuan dari dilaksanakannya penelaahan usulan RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam usulan RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran/Pagu Alokasi Anggaran yang ditetapkan, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.



#### D. Ruang Lingkup Penelaahan Usulan RKA-K/L

Ruang lingkup Penelaahan Usulan RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L satuan kerja dan dokumen pendukungnya yang mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Penelaahan Usulan RKA-K/L ini dilakukan terhadap Pagu Anggaran/Pagu Alokasi anggaran dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan Penelaahan ini tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan anggaran satuan kerja kepada Tim SKI. Tanggung jawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bidang Perencanaan dan Evaluasi selaku penyusun RKA-K/L.

#### E. Metodologi Penelaahan Usulan RKA-K/L

1. Penelaahan dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-K/L satuan kerja.
2. Pelaksanaan penelaahan RKA-K/L berdasarkan Surat Undangan Nomor PS.03.05/C.X.5/1675/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Undangan Reviu SKI terhadap RKAKL 2026 Balai Karkes Kelas I Bandung tanggal 21 Juli 2025 untuk pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit TA. 2026 tanggal 21 s.d 25 Maret 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:
  - a. Koordinator : dr. Sedya Dwisangka, M.Epid.
  - b. Ketua Tim : Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM
  - c. Anggota Tim : Sira Elko, SKM  
Dewi Patmawati, S.K.M.

#### F. Gambaran Umum Penelaahan Usulan RKA-K/L

Informasi umum satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Nama Satker : BKK Kelas I Bandung
2. Alamat : Jl. Cikapayang No. 5 Kota Bandung
3. Nama Kepala Satker : dr. Sedya Dwisangka, M.Epid.
4. Nama Penanggung Jawab : dr. Sedya Dwisangka, M.Epid.  
Anggaran
5. Nilai Anggaran yang ditelaah : Rp 26.009.890.000.

Pagu Anggaran/Pagu Alokasi Anggaran atas usulan RKA-K/L satuan kerja BKK Kelas I Bandung sebesar Rp 38.680.859.736. dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1.	Rupiah Murni	18.867.491.000
2.	PNBP	7.142.399.000
JUMLAH		26.009.890.000

G. Uraian Hasil Penelaahan

NO	KODE	KETERANGAN	JUMLAH	SUMBER DANA
4249	Dukungan Pelayanan	Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	7.142.399.0000	PNBP
1	4249.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	28.750.000	PNBP
2	4249.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	396.677.000	PNBP
3	4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	637.908.000	PNBP
4	4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	2.248.060.000	PNBP
5	4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	32.000.000	PNBP
6	4249.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	43.344.000	PNBP
7	4249.QAH.008	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	101.700.000	PNBP
8	4249.QAH.009	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	34.488.000	PNBP
9	4249.QAH.011	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	34.560.000	PNBP
10	4249.QAH.012	Layanan survei faktor risiko penyakit Malaria	20.640.000	PNBP
11	4249.QAH.013	Layanan survei faktor risiko penyakit Diare	25.920.000	PNBP
12	4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	39.420.000	PNBP
13	4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	109.100.000	PNBP
14	4249.QAH.U25	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	173.600.000	PNBP
15	4249.QAH.U26	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori II	481.750.000	PNBP
16	4249.QAH.U27	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	688.750.000	PNBP
17	4249.QAH.U28	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I	79.200.000	PNBP
18	4249.QAH.U29	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori II	344.000.000	PNBP
19	4249.QAH.U30	Pelayanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	637.000.000	PNBP
20	4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	985.532.000	PNBP



4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		18.867.491.000	RM
1	4815.EBA.956 Layanan BMN	0	
2	4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	0	
3	4815.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0	
4	4815.EBA.962 Layanan Umum	0	
5	4815.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	0	
6	4815.EBA.994.01 Gaji dan Tunjangan	12.648.668.000	RM
7	4815.EBA.994.02 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.218.823.000	RM
8	4815.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	0	
9	4815.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	0	
10	4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0	
11	4815.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	
12	4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	0	
13	4815.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kebersihan	0	

Adapun yang menjadi catatan pada pelaksanaan penelaahan tersebut adalah sebagai berikut:

2. Kesesuaian anggaran pengadaan dengan ketentuan dan data dukung Terdapat : a. 4249.QAH.017.E Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Ke Pusat maksimal 3 orang, usulan 4 orang. b. 4249.QAH.017.F. Konsultasi Program Surveilans Epidemiologi ke Pusat maksimal 3 orang, usulan 4 orang. c. 4249.QAH.017.0. Bimtek/Koordinasi Tim Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus wilker keinduk maksimal 2 orang, usulan 3 orang
Kesimpulan: Usulan harap memperhatikan efektivitas dan sesuai dengan jukren
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran a. Memaksimalkan penganggaran berdasarkan SBK b. Penganggaran agar sesuai dengan jukren
Kesimpulan : Efektivitas penganggaran sesuai jukren
3. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk penelaahan RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L )
Kesimpulan : -
4. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kendaraan/sarana kantor -
Anggaran pemeliharaan telah sesuai/tidak sesuai*) ketentuan. Kesimpulan : -
5. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama -
Anggaran pemeliharaan telah sesuai/tidak sesuai*) ketentuan. Kesimpulan : -

Catatan Lainnya:

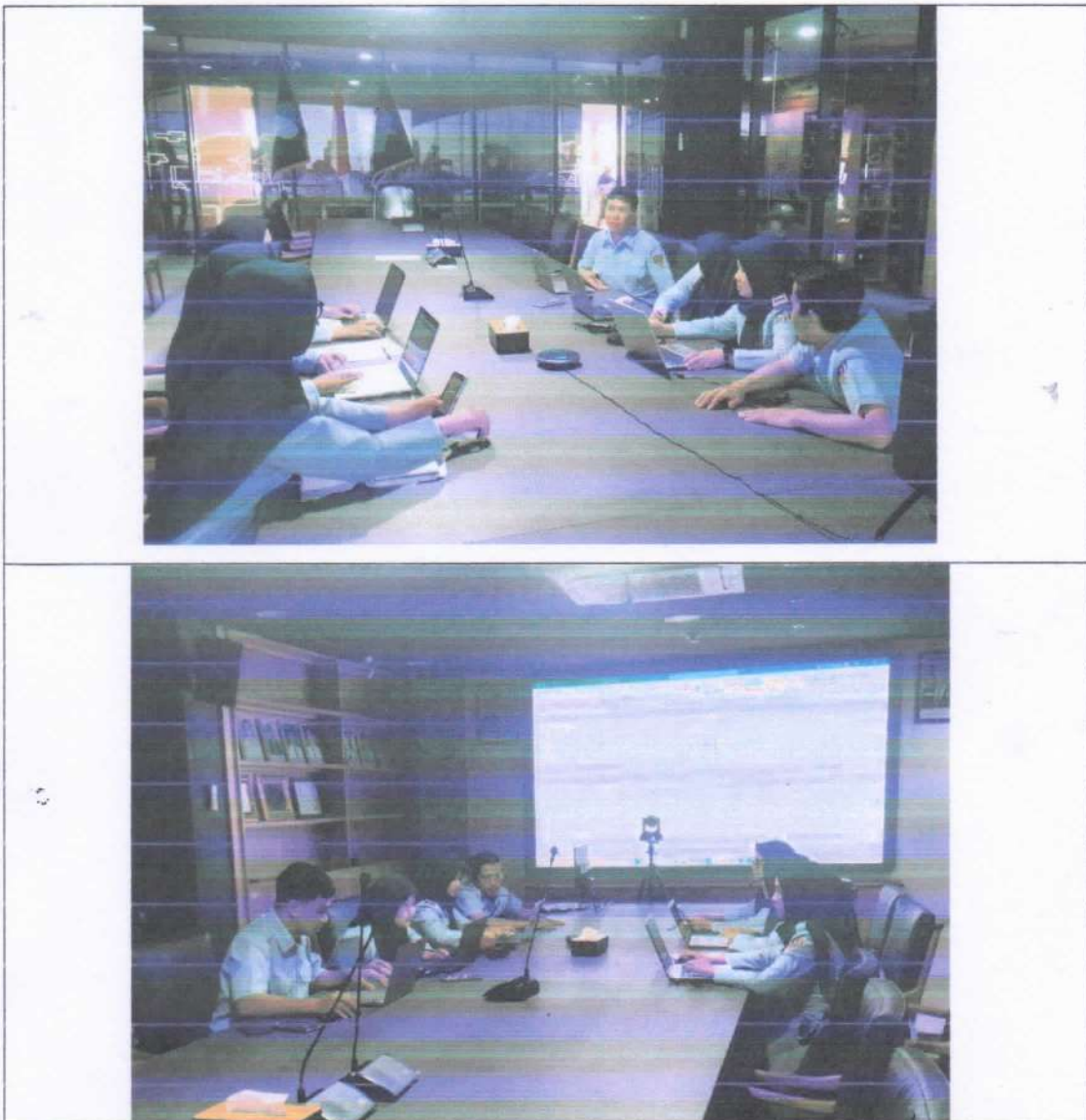
1. Koreksi/perbaikan yang belum dilakukan/ditindaklanjuti:  
-
2. Rekomendasi:
  - 1) Surveilans Epidemiologi: Tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih tajam. Contoh: "Menurunkan waktu deteksi kasus impor penyakit X dari 48 jam menjadi 24 jam" atau "Mencapai 95% kelengkapan laporan surveilans mingguan dari semua wilker secara real-time" Pengendalian Vektor: Alokasikan sebagian kecil anggaran "Pengendalian Vektor" (Kode 4249.QAH.016) untuk kegiatan evaluasi dampak. Misalnya, melakukan survei kepadatan jentik/nyamuk sebelum dan sesudah intervensi untuk mengukur efektivitas program, bukan hanya melaporkan bahwa fogging telah dilaksanakan.
  - 2) Simulasi dan Kesiapsiagaan: Memanfaatkan anggaran "Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah" (Kode 4249.QAH.017-A) untuk melaksanakan simulasi atau tabletop exercise penanganan wabah minimal 2 kali setahun. Ini akan meningkatkan kesiapan tim secara nyata dengan biaya yang relatif kecil (hanya biaya rapat dan ATK).
  - 3) Jasa Outsourcing (Rp 3,64 Miliar): Ini adalah pos terbesar. Lakukan evaluasi kinerja vendor setiap triwulan. Buat daftar periksa (checklist) kinerja yang jelas untuk tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Jika kinerja tidak sesuai kontrak,



pertimbangan untuk memberikan teguran atau bahkan mencari vendor alternatif pada siklus pengadaan berikutnya untuk mendapatkan value for money yang lebih baik.

- 4) Pemeliharaan Peralatan (Rp 1,00 Miliar): Implementasikan jadwal pemeliharaan preventif yang ketat untuk aset vital seperti genset, lift, dan kendaraan. Anggaran ini seringkali bersifat reaktif (memperbaiki saat sudah rusak). Dengan pemeliharaan preventif, kerusakan besar yang memakan biaya tinggi dapat dihindari.
  - 5) Ketergantungan pada PNB: Sebagian besar kegiatan teknis didanai PNB. Perlu ada analisis risiko dan rencana kontingensi. Apa yang terjadi jika target PNB tidak tercapai? Identifikasi kegiatan prioritas tertinggi yang tidak boleh berhenti dan siapkan skenario realokasi anggaran dari pos-pos yang kurang krusial jika terjadi kekurangan dana
3. Catatan Hasil Penelaahan (CHP atas usulan RKA-K/L) terlampir.

#### H. Dokumentasi Kegiatan



## **I. Apresiasi**

Tim SKI menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi selaku penyusun RKA-K/L atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat terlaksananya kegiatan penelaahan usulan RKA-K/L ini.

## **J. Penutup**

Demikian Laporan Hasil penelaahan usulan RKA-K/L TA 2026 ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim SKI,



**Yani Dwiylu Setiani, SKM, MKM**  
NIP. 197107301993032001